

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS JUDI ONLINE DI INDONESIA

¹Aswin Sanjaya*, ²Ahmad Hadi Prayitno

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

dyan@unissula.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kasus judi online di Indonesia dan untuk mengetahui efektivitas upaya penegakan hukum terhadap perjudian online. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini penegakan hukum pidana terhadap kasus judi online di Indonesia didasarkan pada KUHP dan UU ITE. Pasal 427 UU 1/2023 mengatur hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda hingga 50 juta rupiah bagi pelaku, sementara Pasal 426 mencakup sanksi berat bagi penyelenggara. Selain itu, Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 menetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah bagi yang mendistribusikan konten perjudian melalui media elektronik. Dasar hukum ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menangani kasus judi online. Efektivitas upaya penegakan hukum terhadap perjudian online, menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan teknologi, koordinasi antar-lembaga, dan kerjasama internasional. Teknologi yang terus berkembang membuat identifikasi dan penutupan situs perjudian online sulit dilakukan. Selain itu, keterbatasan sumber dayadan pelatihan aparat penegak hukum, serta koordinasi yang lemah antar-lembaga pemerintah, memperburuk situasi. Diperlukan pendekatan komprehensif, mencakup penguatan regulasi, kampanye kesadaran publik, dan sinergi antar-kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci : Hukum, Judi Online, Penegakan.

ABSTRACT

The study aims to understand the enforcement of criminal law against online gambling cases in Indonesia and evaluate the effectiveness of these efforts. The method used in this study involves normative legal research by analyzing issues through legal principles and referring to legal norms in legislation. The results of this study show criminal law enforcement against online gambling cases in Indonesia is based on the KUHP and ITE Law. Article 427 of Law No 1 Year 2023 regulates a maximum sentence of 3 years imprisonment or fines up to 50 Million Rupiah for perpetrators, while Article 426 of Law No 1 Year 2023 National KUHP includes additional sanctions for providers of 3 years imprisonment and 2 Billion Rupiah fines. Furthermore, Article 27 paragraph (2) Jo Article 45 paragraph 3 of Law No 1 Year 2024 ITE Law stipulates sentences up to 10 years imprisonment or 10 billion rupiah fines for those distributing gambling content through electronic media. This legal basis strengthens government commitment in handling online gambling cases. Effectiveness of law enforcement efforts against online gambling faces significant challenges, including technological limitations, inter-agency coordination, and international cooperation. Constantly evolving technology makes identifying and closing online gambling sites difficult to perform. Moreover, limited resources and law enforcement training, plus weak coordination between government agencies, worsen the situation. A comprehensive approach is required, including regulatory strengthening, public awareness campaigns, and synergy between policies to improve law enforcement effectiveness.

Keywords: *Law, Online Gambling, Enforcement.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap norma hukum yang berlaku dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali melalui ancaman sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum berfungsi sebagai kumpulan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib demi menjamin keamanan dalam interaksi sosial warga negara. Perkembangan zaman yang disertai kemajuan teknologi informasi membawa perubahan signifikan terhadap perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kemudahan yang ditawarkan teknologi ternyata menjadi celah bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks dan bervariasi. Fenomena kejahatan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah guna memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga di tengah arus modernisasi global¹.

Kejahatan pada hakikatnya bukanlah merupakan fenomena baru dalam sejarah peradaban umat manusia sejak masa penciptaan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan telah tercatat sebagai bentuk awal penentangan yang didorong oleh sifat iri hati, kesombongan, serta kedengkian. Manifestasi kejahatan tersebut terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Manusia sebagai

¹ Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h, 88

mahluk sosial memiliki kecenderungan alami untuk hidup dalam keteraturan dan ketertiban demi kenyamanan bersama. Perbedaan pandangan mengenai definisi keteraturan antara individu satu dengan lainnya sering kali memicu terjadinya benturan kepentingan yang merugikan. Kebutuhan akan seperangkat aturan hukum menjadi sangat mendesak untuk menyeimbangkan hak serta kewajiban setiap orang dalam bernegara. Pedoman hukum berfungsi sebagai cermin harapan masyarakat sekaligus instrumen kendali sosial yang bersifat memaksa dan mengikat².

Penegakan hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto merupakan proses penyelarasan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum yang stabil. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial masyarakat. Aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, serta hakim memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan secara efektif. Hukum tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen tertulis tanpa adanya penerapan yang konkret di lapangan oleh instansi berwenang. Keberhasilan suatu produk hukum sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan oleh para penegak hukum yang diberi mandat oleh negara. Teknologi modern saat ini memegang peranan kunci sebagai alat perubahan yang sangat efektif dalam struktur kehidupan masyarakat masa kini. Ketergantungan manusia terhadap perangkat digital memberikan dampak ganda yang meliputi sisi positif maupun sisi negatif yang destruktif³.

Kemajuan industri yang menjadi produk budaya manusia selain membawa manfaat besar juga melahirkan dampak buruk bagi peradaban. J.E. Sahetapy mengungkapkan bahwa tingkat kemajuan suatu masyarakat berbanding lurus dengan kecanggihan modus operandi kejahatan yang terjadi di dalamnya. Internet telah memindahkan sebagian besar aktivitas kehidupan nyata ke dalam ruang virtual yang tanpa batas dan sulit diawasi. Aktivitas yang sebelumnya sulit dilakukan di dunia fisik kini dapat terselesaikan dengan sangat mudah melalui jaringan komputer global. Salah satu bentuk kejahatan yang bertransformasi secara radikal akibat kemajuan teknologi komunikasi adalah praktik perjudian online yang meresahkan. Perjudian konvensional yang dahulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi kini telah beralih menjadi industri daring yang bernilai ekonomi sangat besar. Nilai transaksi industri ini diperkirakan dapat mencapai angka 10.000.000.000 dollar Amerika Serikat menurut pengamatan para pakar⁴.

Pemerintah Indonesia melarang keras segala bentuk perjudian karena bertentangan dengan nilai moral, agama, serta hukum positif yang berlaku. Tindak pidana perjudian secara umum diatur dalam Pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Definisi permainan judi menitikberatkan pada adanya unsur keberuntungan semata yang menjanjikan keuntungan finansial secara instan bagi para pemainnya. Aturan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini bertujuan mengatur, melarang, serta memberikan ancaman pidana bagi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Praktik ini terus

² Ashshofa, Amirudin. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, h, 56

³ Maskun. 2013. *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, h, 44

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, h, 23

berkembang karena menawarkan keuntungan menggiurkan melalui berbagai jenis permainan seperti togel, kasino, hingga kartu domino. Masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi sering kali terjebak dalam lingkaran perjudian ini karena kemudahan aksesnya⁵.

Mekanisme akses terhadap situs judi online saat ini dirancang sedemikian rupa agar dapat dijangkau oleh siapa pun. Pengguna hanya perlu melakukan pendaftaran akun dan mengirimkan deposit dana melalui mesin anjungan tunai mandiri sesuai nominal. Perjudian mengandung unsur kriminalitas signifikan yang selalu menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah dalam setiap putaran. Situasi tersebut sangat membahayakan stabilitas finansial serta kesehatan mental bagi individu yang sudah mengalami tingkat kecanduan parah. Para pecandu judi cenderung mempertaruhkan seluruh harta benda mereka demi mengejar kemenangan yang bersifat semu dan tidak pasti. Kekalahan yang dialami secara terus-menerus dapat memicu guncangan fisik serta depresi berat yang berujung pada frustrasi kehidupan. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ilegal yang merugikan ini⁶.

Prinsip hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *lex specialis derogate legi generalis* diterapkan dalam pengaturan judi online di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi landasan utama bagi aparat dalam menjerat para pelaku yang terlibat dalam transaksi elektronik. Meskipun regulasi telah tersedia, proses penegakan hukum di lapangan masih sering dianggap kurang memadai dan belum memberikan efek jera. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini mencakup bentuk penyertaan individu maupun pertanggungjawaban korporasi yang mengelola platform judi tersebut. Celah hukum masih sering ditemukan terutama ketika pelaku berargumen bahwa aktivitas tersebut bukanlah mata pencaharian utama mereka sehari-hari. Tantangan global berupa legalitas judi di negara lain serta penggunaan peladen luar negeri menambah kerumitan proses penyidikan. Kerjasama internasional menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk melacak aliran dana serta menangkap bandar besar⁷.

Periode antara tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan pertumbuhan jumlah pengguna judi online yang sangat pesat di Indonesia. Fenomena tersebut didorong oleh perluasan akses internet serta penggunaan telepon pintar yang semakin masif di seluruh wilayah pelosok. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa ribuan situs telah diblokir, namun situs baru selalu muncul dengan domain berbeda. Wilayah Jawa Barat khususnya Kota Bandung mencatatkan kenaikan kasus yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari remaja hingga orang dewasa. Penulis merasa perlu melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana guna mencari solusi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan judi online demi menjaga stabilitas sosial masyarakat. Fokus utama analisis terletak pada kekuatan instrumen hukum dalam menghadapi kecanggihan teknologi informasi saat ini.

⁵ Sodikin. 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: IN Media, h, 23

⁶ Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, h, 55

⁷ Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h, 34

B. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

a. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Judi Online di Indonesia

Penegakan hukum pidana terhadap aktivitas perjudian berbasis internet di wilayah Indonesia merupakan prioritas utama bagi pemerintah guna melindungi stabilitas sosial masyarakat dari dampak destruktif yang dihasilkan. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat pada tahun 2024 ini membawa konsekuensi berupa maraknya platform taruhan ilegal yang mudah diakses melalui telepon pintar maupun perangkat komputer pribadi. Aparat kepolisian dituntut untuk memiliki kapabilitas digital yang mumpuni dalam melacak aliran dana serta identitas para pelaku yang sering kali bersembunyi di balik anonimitas dunia maya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memberikan landasan bagi negara untuk melakukan penindakan tegas terhadap setiap individu yang terlibat dalam ekosistem haram tersebut. Sinergi antara lembaga penegak hukum dengan kementerian terkait menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai distribusi konten perjudian yang merusak moralitas generasi muda bangsa.

Mekanisme pemidanaan terhadap para pelaku perjudian daring diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik yang telah diperbarui. Polisi melakukan proses penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai bukti digital yang otentik seperti riwayat transaksi bank serta rekaman aktivitas pada peladen atau server yang digunakan oleh penyelenggara. Penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan wewenang luas bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan perjudian tersebut. Kehadiran aturan ini memperkuat posisi hukum negara dalam menjerat tidak hanya para pemain, tetapi juga para bandar besar yang mengendalikan operasional situs dari balik layar. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran taruhan yang manipulatif⁸.

Unsur kesengajaan menjadi syarat mutlak yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan untuk menjatuhkan vonis pidana terhadap seorang pemain judi online. Seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila secara sadar melakukan pendaftaran pada situs taruhan, menyetorkan sejumlah uang, dan berpartisipasi dalam permainan dengan harapan memperoleh keuntungan finansial. Bukti-bukti yang dihadirkan di depan hakim harus menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat jahat untuk melanggar ketentuan hukum yang melarang segala bentuk perjudian di wilayah Indonesia. Tanpa adanya pembuktian unsur kesengajaan yang kuat, proses hukum pidana akan sulit mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Aparat penegak hukum

⁸ Fauzi, Ahmad. *Penegakan Hukum Pidana Perjudian Online*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021, h, 99

senantiasa berhati-hati dalam melakukan verifikasi terhadap data digital guna memastikan bahwa tidak ada warga negara yang menjadi korban salah tangkap dalam operasi siber.

Penyelenggara atau admin situs judi daring memegang tanggung jawab hukum yang jauh lebih berat dibandingkan dengan para peserta permainan biasa dalam sistem peradilan. Mereka berperan sebagai aktor intelektual yang menyediakan sarana, mengelola basis data pengguna, serta mengatur distribusi kemenangan dan kekalahan secara sistematis menggunakan algoritma komputer. Pasal 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan sanksi penjara hingga 10 tahun bagi setiap orang yang memberikan kesempatan kepada publik untuk bermain judi sebagai mata pencaharian. Fokus penegakan hukum diarahkan pada upaya melumpuhkan infrastruktur digital yang dimiliki oleh para bandar guna menghentikan operasional situs secara total dan permanen. Kerjasama dengan penyedia jasa internet dilakukan secara intensif untuk memblokir akses terhadap alamat protokol internet yang terindikasi kuat memuat konten perjudian ilegal yang meresahkan publik secara luas.

Proses penangkapan terhadap operator judi sering kali menghadapi kendala teknis karena penggunaan jaringan pribadi virtual yang menyamarkan lokasi fisik peladen utama mereka. Pelaku kejahatan siber menggunakan teknologi enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi komunikasi internal mereka dari pantauan tim siber kepolisian yang melakukan patroli digital secara rutin. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kualitas perangkat lunak pengawasan serta memberikan pelatihan khusus bagi para penyidik agar mampu menembus sistem keamanan yang dibangun oleh para sindikat. Keberhasilan dalam mengungkap jaringan judi lintas negara sangat bergantung pada kecepatan aparat dalam merespons setiap perubahan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Penegakan hukum yang bersifat adaptif menjadi sangat krusial mengingat sifat dunia digital yang sangat dinamis dan selalu berkembang melampaui batas-batas yurisdiksi hukum konvensional yang ada.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan administratif yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum pidana melalui tindakan pemutusan akses secara mandiri. Ribuan situs dan aplikasi perjudian telah diblokir setiap bulannya sebagai langkah preventif untuk meminimalisir jumlah korban di kalangan masyarakat yang mudah tergiur keuntungan instan. Tindakan administratif ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari strategi besar pemerintah dalam memerangi kejahatan siber yang memiliki dampak ekonomi sangat besar. Para penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk mematuhi perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang guna menjaga keamanan ruang digital nasional dari konten negatif. Penegakan hukum di lapangan akan berjalan lebih efektif apabila akses publik terhadap sarana perjudian telah ditutup rapat melalui kebijakan teknis yang dilakukan secara sistemik dan terus-menerus⁹.

Sanksi denda yang sangat besar juga diterapkan bagi para pelaku tindak pidana perjudian online sebagai bentuk hukuman tambahan guna menguras sumber daya finansial mereka.

⁹ Hatta, Muhammad. *Hukum Pidana Terhadap Perjudian Online*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2023, h, 77

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan nilai denda yang mencapai miliaran rupiah bagi mereka yang mendistribusikan atau membuat informasi elektronik yang memuat konten perjudian dapat diakses. Penekanan pada hukuman finansial ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis perjudian tidak lagi menjadi aktivitas yang menguntungkan bagi para sindikat kriminal di masa depan. Hasil dari denda tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang nantinya digunakan untuk mendanai program edukasi digital. Penegakan hukum yang menysasar aspek ekonomi pelaku terbukti lebih efektif dalam melumpuhkan struktur organisasi kejahatan yang sangat bergantung pada perputaran modal besar dari para pemainnya.

Koordinasi lintas sektoral antara kepolisian, perbankan, dan pusat pelaporan transaksi keuangan menjadi fondasi utama dalam melacak aliran uang hasil perjudian daring yang sangat kompleks. Rekening-rekening yang digunakan untuk menampung dana taruhan dapat segera dibekukan setelah mendapatkan penetapan dari pihak berwenang guna mencegah penghilangan barang bukti atau pencucian uang. Sistem pelaporan otomatis yang dibangun oleh lembaga keuangan membantu aparat dalam mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil nasabah pada umumnya. Penegakan hukum pidana tidak hanya berhenti pada penangkapan fisik pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kerugian negara serta pengembalian aset yang disita. Transparansi dalam pengelolaan aset sitaan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas aparat yang bertugas di lapangan selama proses penyidikan berlangsung hingga selesai.

Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan kasus judi online tetap dijamin oleh undang-undang guna memastikan berjalannya proses hukum yang adil dan tidak memihak. Setiap pelaku yang ditangkap berhak mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara serta diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan hakim yang tetap. Penegakan hukum yang bermartabat akan memperkuat legitimasi negara dalam memberantas segala bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh norma hukum maupun norma agama yang berlaku. Polisi harus memastikan bahwa seluruh prosedur pengeledahan dan penyitaan barang bukti elektronik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana. Keadilan prosedural merupakan aspek vital yang harus dijaga agar hasil dari penegakan hukum pidana tersebut tidak mudah dibatalkan melalui upaya praperadilan yang diajukan oleh pihak tersangka.

Masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu keberhasilan penegakan hukum melalui pemberian informasi mengenai keberadaan situs atau aktivitas judi di lingkungan mereka. Kanal pengaduan resmi yang disediakan oleh pemerintah memudahkan warga untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran hukum yang mereka temukan di platform media sosial maupun aplikasi pesan. Partisipasi aktif publik menjadi sistem peringatan dini yang sangat efektif bagi aparat untuk segera melakukan tindakan pencegahan sebelum korban jatuh semakin banyak. Penegakan hukum yang inklusif melibatkan kesadaran kolektif untuk bersama-sama menjaga lingkungan digital agar tetap bersih dari pengaruh negatif perjudian yang merusak tatanan sosial. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan benteng pertahanan yang kuat dalam menghadapi serangan masif dari para operator judi yang tidak mengenal batas wilayah negara.

b. Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online

Efektivitas upaya penegakan hukum terhadap perjudian online di wilayah kedaulatan Indonesia pada tahun 2024 ini masih menghadapi berbagai kendala teknis yang bersifat sistemik. Meskipun regulasi hukum telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, namun kecepatan adaptasi teknologi oleh para pelaku kejahatan sering kali melampaui kemampuan deteksi aparat. Penggunaan mata uang kripto dalam transaksi taruhan menjadi hambatan besar karena sifatnya yang anonim dan sangat sulit dilacak oleh sistem perbankan konvensional yang ada. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah situs yang diblokir, melainkan juga dari sejauh mana jaringan utama bandar judi dapat dihancurkan. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap strategi investigasi yang selama ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap tindakan hukum memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kriminalitas siber¹⁰.

Sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam bidang forensik digital menjadi faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas penindakan terhadap sindikat judi internasional yang sangat terorganisir. Jumlah personel kepolisian yang memiliki sertifikasi internasional di bidang keamanan siber masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya cakupan internet yang harus diawasi setiap hari. Keterbatasan ini sering kali mengakibatkan proses penyelidikan berjalan lambat dan memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk menghilangkan jejak digital mereka sebelum tertangkap. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program pelatihan berkelanjutan bagi para penyidik di tingkat pusat maupun daerah secara merata. Peningkatan kapasitas teknis aparat akan berdampak langsung pada kualitas barang bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga hakim dapat menjatuhkan vonis yang maksimal bagi para pelanggar hukum.

Kolaborasi internasional merupakan elemen krusial yang menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum mengingat sebagian besar server judi online berlokasi di luar yurisdiksi Indonesia. Tanpa adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik yang kuat dengan negara tetangga, upaya penangkapan terhadap bandar besar akan selalu menemui jalan buntu di perbatasan. Banyak negara yang memiliki aturan hukum berbeda terkait perjudian, sehingga proses ekstradisi pelaku sering kali memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit. Indonesia harus lebih aktif dalam forum diplomasi keamanan siber guna membangun kesepahaman bersama tentang bahaya perjudian lintas negara yang merusak ekonomi domestik. Sinergi global akan menutup ruang gerak para pelaku kejahatan untuk bersembunyi di negara-negara yang selama ini dianggap sebagai tempat perlindungan aman bagi bisnis ilegal tersebut.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan pengadilan terhadap kasus judi online juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Apabila vonis yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan, maka hal tersebut tidak akan mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku maupun calon pelaku lainnya. Standarisasi tuntutan pidana bagi kasus perjudian siber perlu dirumuskan agar terdapat keseragaman hukuman di seluruh wilayah Indonesia untuk jenis pelanggaran yang sama. Penegakan hukum yang tegas harus didukung oleh integritas para

¹⁰ Rahmawati, Fitria. *Aspek Hukum Pidana Perjudian Online*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022, h, 60

penegak hukum agar tidak terjadi praktik korupsi dalam penanganan perkara yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Kepercayaan publik akan meningkat apabila mereka melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat dalam jaringan perjudian haram yang meresahkan¹¹.

Edukasi publik secara masif mengenai risiko hukum dan finansial dari perjudian online merupakan langkah preventif yang sangat efektif untuk melengkapi tindakan represif dari kepolisian. Penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal jika permintaan pasar terhadap layanan judi dari masyarakat masih tetap tinggi dan tidak terkendali. Kampanye anti judi harus menyasar kelompok rentan seperti pelajar dan pekerja berpenghasilan rendah yang sering kali menjadi target utama pemasaran situs taruhan ilegal. Literasi digital yang baik akan membuat masyarakat mampu membedakan antara konten hiburan yang sehat dengan jebakan judi yang dibungkus dalam bentuk permainan. Pemerintah bersama tokoh masyarakat perlu membangun narasi yang kuat tentang dampak buruk judi bagi keharmonisan rumah tangga serta masa depan ekonomi keluarga yang bisa hancur seketika.

Integrasi sistem pelaporan antara kementerian dan lembaga terkait perlu ditingkatkan guna mempercepat proses eksekusi pemblokiran terhadap alamat situs yang terbukti memfasilitasi aktivitas perjudian. Saat ini masih terdapat jeda waktu antara penemuan situs ilegal dengan tindakan pemutusan akses yang sering kali dimanfaatkan oleh operator untuk berpindah domain. Penggunaan kecerdasan buatan dalam memantau pergerakan konten perjudian di internet dapat menjadi solusi untuk melakukan pemblokiran secara otomatis dan waktu nyata atau real time. Efektivitas teknologi pengawasan akan sangat membantu mengurangi beban kerja manual aparat yang selama ini harus melakukan verifikasi satu per satu terhadap laporan publik. Inovasi dalam bidang teknologi pengawasan menjadi syarat mutlak bagi negara untuk tetap memegang kendali atas keamanan ruang digital dari ancaman kejahatan siber yang semakin canggih.

Pengawasan terhadap iklan judi online yang terselubung di berbagai platform media sosial dan situs berita lokal juga menjadi tantangan besar bagi efektivitas penegakan hukum. Para agen judi sering kali menggunakan jasa pembuat pengaruh atau influencer untuk mempromosikan situs mereka dengan narasi yang menyesatkan publik melalui janji kemenangan mudah. Penegakan hukum harus mampu menjangkau pihak-pihak yang turut serta membantu mempromosikan konten perjudian tersebut dengan ancaman sanksi pidana yang sama beratnya. Regulasi yang mengatur tanggung jawab pemilik platform digital terhadap konten yang beredar di ekosistem mereka perlu dipertegas guna mencegah pembiaran terhadap aktivitas ilegal. Kehadiran aturan yang mewajibkan platform untuk melakukan penyaringan konten secara mandiri akan sangat membantu meringankan tugas pemerintah dalam melakukan pengawasan harian di dunia maya yang sangat luas.

Transparansi dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus perjudian online akan memberikan dampak positif bagi dukungan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum di lapangan. Informasi mengenai jumlah tersangka yang ditangkap serta total aset

¹¹ Sari, Siti Hajar. *Regulasi dan Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia*. Bandung: Penerbit Harapan Cendekia, 2022, h, 112

yang disita harus disampaikan secara berkala kepada publik melalui kanal komunikasi yang mudah diakses. Akuntabilitas ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar serius dalam memerangi perjudian dan tidak melakukan tebang pilih dalam setiap proses penindakan. Masyarakat yang merasa dilibatkan dalam proses pengawasan akan lebih bersemangat untuk memberikan informasi intelijen yang berguna bagi pengembangan kasus oleh pihak kepolisian. Hubungan yang harmonis antara aparat dan warga negara akan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan bisnis ilegal mereka di tengah masyarakat¹².

Audit secara rutin terhadap operasional penyedia jasa pembayaran digital diperlukan guna memastikan bahwa sistem mereka tidak disalahgunakan sebagai sarana penampungan dana judi online. Perusahaan teknologi finansial diwajibkan untuk menerapkan prinsip kenali nasabah anda secara ketat serta memantau setiap transaksi yang mencurigakan secara terus-menerus selama 24 jam. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana jalur distribusi keuangan para bandar dapat diputus secara total hingga ke akar-akarnya. Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi lembaga keuangan yang terbukti lalai dalam melakukan pengawasan harus diterapkan secara tegas tanpa ada toleransi sedikitpun. Kerjasama yang erat antara otoritas jasa keuangan dan penyidik kepolisian akan menutup celah bagi terjadinya praktik pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perjudian yang merugikan stabilitas ekonomi nasional.

Evaluasi terhadap efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang baru harus dilakukan secara berkala oleh dewan perwakilan rakyat guna melakukan penyesuaian jika ditemukan kekurangan. Hukum harus selalu bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin bergantung pada teknologi. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Keberhasilan dalam memberantas judi online akan menjadi prestasi besar bagi pemerintah dalam menjaga integritas sosial serta moralitas bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara akan memastikan bahwa Indonesia menjadi wilayah yang bersih dari segala bentuk perjudian digital yang bersifat merusak dan melanggar hukum.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap kasus judi online di Indonesia didasarkan pada KUHP dan UU ITE. Pasal 427 UU 1/2023 mengatur hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda hingga 50 juta rupiah bagi pelaku, sementara Pasal 426 mencakup sanksi berat bagi penyelenggara. Selain itu, Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 menetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah bagi yang mendistribusikan konten perjudian melalui media elektronik. Dasar hukum ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menangani kasus judi online.

¹² Setiawan, Pramudya. *Hukum Pidana dan Teknologi Perjudian Online*. Jakarta: Penerbit Media Pressindo, 2022, h, 94

2. Efektivitas upaya penegakan hukum terhadap perjudian online, menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan teknologi, koordinasi antar-lembaga, dan kerjasama internasional. Teknologi yang terus berkembang membuat identifikasi dan penutupan situs perjudian online sulit dilakukan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pelatihan aparat penegak hukum, serta koordinasi yang lemah antar-lembaga pemerintah, memperburuk situasi. Diperlukan pendekatan komprehensif, mencakup penguatan regulasi, kampanye kesadaran publik, dan sinergi antar-kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

b. Saran

1. Sinkronisasi UU ITE dan regulasi perjudian, memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 guna menjangkau tipologi perjudian daring kontemporer dan modus operandi operator. Penguatan aspek teknis perlu dilakukan melalui formulasi regulasi spesifik mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam perjudian, termasuk enkripsi data, transaksi aset kripto, serta yurisdiksi penggunaan server internasional untuk memastikan penegakan hukum yang lebih komprehensif.
2. Edukasi diri sendiri dengan pelajari bahaya dan dampak negatif dari perjudian online dan hindari keterlibatan dalam aktivitas ilegal ini dan berpartisipasi kampanye kesadaran dukung kampanye kesadaran publik dengan menyebarluaskan informasi tentang risiko perjudian online di komunitas atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin & Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, Ahmad. 2021. *Penegakan Hukum Pidana Perjudian Online*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hatta, Muhammad. 2023. *Hukum Pidana Terhadap Perjudian Online*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rahmawati, Fitria. 2022. *Aspek Hukum Pidana Perjudian Online*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sari, Siti Hajar. 2022. *Regulasi dan Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia*. Bandung: Penerbit Harapan Cendekia.

Setiawan, Pramudya. 2022. *Hukum Pidana dan Teknologi Perjudian Online*. Jakarta: Penerbit Media Pressindo.

Sodikin. 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: IN Media.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.